

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rezim Orde Baru yang represif dan otoriter terlihat *vis a vis* dengan agama, terutama Islam yang mengkeritik pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai macam konflik yang terjadi antara negara dengan agama, khususnya Islam. Khusus Tanjung Periok misalnya, sangat jelas menunjukkan pertentangan antara kelompok Islam dengan pemerintah dimana ratusan demonstran yang dipimpin Amir Biki ditembak mati di tempat oleh militer sebagai buntut demonstrasi masa memperotes personil tentara yang merobek brosur himbauan agar perempuan-perempuan muslim mengenakan jilbab. Meskipun dalam wacana dan kebijakan yang dikembangkan adalah Indonesia bukan negara sekuler namun juga bukan negara teokrasi¹.

Namun begitu kecenderungan sekularisasi agama pada masa Orde Baru juga cukuplah kuat. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilarangnya partai berbasis agama. Meskipun ada satu partai yang merupakan kumpulan dari seluruh faksi Islam di Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetap saja partai ini tidak berasaskan Islam tetapi berasaskan Pancasila. Dengan kata lain agama tidak dianggap sebagai fakta politik melainkan sebagai fakta kultural².

¹Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru*. Kencana : Jakarta hal. 305

²Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru*. Kencana : Jakarta hal. 306

Tidak hanya dalam praktek politik formal, di dataran *civil society* pun diberlakukan hal yang sama yaitu dengan dikeluarkannya azas tunggal dalam setiap organisasi dan perserikatan yang didirikan oleh masyarakat sipil. Gerakan politik keagamaan, khususnya Islam pun berkurang kekuatannya di Indonesia yang sempat muncul sejak 1960-an³. Maka Islam politik pun menjadi frase yang seolah tak pernah muncul dalam konfigurasi politik rezim Orde Baru. Praktis para aktivis Islam Politik dalam partai dan *civil society* pun seperti tidak terlihat.

Runtuhnya Rezim Orde Baru menandakan lahirnya era demokratisasi di Indonesia. Kelompok yang berbasis identitas mulai bebas menyuarakan kepentingannya. Salah satunya ialah kelompok Islam. Kelompok-kelompok Islam memiliki kesempatan terbuka untuk menyuarakan kepentingannya, khususnya dalam sistem politik Indonesia. Kelompok ini kemudian dikenal pula dengan istilah Islam Politik. Yaitu kelompok yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai Islam dalam sistem kepartaian maupun non kepartaian.

Islam politik di Indonesia seperti menemukan kehidupannya kembali pasca runtuhnya Orde Baru. Era reformasi memberikan keterbukaan yang luas bagi masyarakat untuk membentuk organisasi atau perserikatan dengan berazaskan apapun selain Pancasila. Maka Islam politik pun mulai menguat kembali baik di sistem politik formal dalam bentuk partai politik maupun dalam masyarakat sipil sebagai bentuk aktivismenya.

³Greg Fealy dalam Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru*, Kencana : Jakarta hal. 306

Gerakan Islam politik sesungguhnya memiliki makna khusus. Tidak semua identitas Islam yang masuk dalam kancah politik di sebut gerakan Islam politik. Masdar Hilmi misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Teologi Perlawanan* menguraikan keterhubungan antara Islam politik dengan Islamisme. Ia menggunakan istilah Islamisme untuk mendeskripsikan segala bentuk aktivisme keagamaan yang memanfaatkan Islam sebagai simbol dan substansi dalam perjuangan politik mereka. Hal ini dipertegas oleh Salwa Ismail sebagai berikut

Islam politik merujuk pada aktivitas organisasi dan gerakan yang menyeruak keruang publik dengan menggunakan tanda dan simbol dari tradisi Islam. Ia termasuk ideologi politik yang mengartikulasikan gagasan perlunya mendirikan sebuah pemerintah Islam, yang dipahami sebagai suatu pemerintah yang menerapkan (hukum Islam)⁴.

Beberapa gerakan Islam politik yang menguat kembali di era reformasi terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama ialah bentuk gerakan yang memperjuangkan syariat Islam melalui partai dalam kontestasi pemilu sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu Partai Islam ideologis di Indonesia. Dapat dilihat pada Anggaran Dasar PKS bahwa partai tersebut berasaskan Islam.⁵

Bentuk yang kedua ialah yang memperjuangkan penegakan syariat Islam melalui jalur non kepartaian. Upaya tersebut ditempuh karena mereka menganggap sistem demokrasi adalah sistem kufur, atau tidak berlandaskan syariat Islam. Mendirikan partai dan berkontestasi dalam pemilu sama saja mengakui tegaknya sistem kufur tersebut. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini antara lain

⁴Ismail Salwa, "Being Muslim Islam, Islamism, and Identity Politics" *Government and opposition* 39, No. 4 (2004), hal 66 dalam Hilmy, Masdar, 2009, *Teologi Perlawanan Islamisme dan Diskursus Demorkasid I Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta : Kanisius.

⁵Machmudi, Yon, 2006. *Islamising Indoensia The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Proseproous Justice party (PKS)*, ANU Press : Canberra hal. 231

Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi AhlulSunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keenam gerakan Islam ini tergolong gerakan Islam fundamentalis. Dalam bukunya “*Sistem Politik Indonesia*” Marijan menyatakan bahwa keempatnya dianggap fundamentalis karena ingin menegakkan Islam di Indonesia dengan syariah komprehensif dan menolak mentah-mentah demokrasi. Untuk HTI, MMI, NII, dan JI secara tegas menginginkan model pemerintahan khalifah persis seperti kekhalifahan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Masih menurut Marijan, dari keenam gerakan Islam politik fundamentalis ini yang mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia ini ialah HTI. HTI memiliki kaderisasi yang sistematis di perkotaan⁶. Jumlah keanggotaannya di Indonesia sekitar sepuluh ribuan orang⁷. Jumlah tersebut kemungkinan bertambah seiring berjalannya waktu. Sebab data tersebut dirilis pada tahun 2005

Tabel I.1

Sikap Politik Kelompok Islam Radikal

Kelompok	Syariah Komperhensif	Negara Islam	Khalifah	Demokrasi
DI/NII	Ya	Ya	Tidak	Tidak
JI	Ya	Ya	Ya	Tidak

⁶Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demorkasi Indoensia Pasca-Orde Baru*. Kencana : Jakarta hal 324

⁷Fealy, Greg and Anthony Bubalo. 2005. *Joining The Caravan ? The Middle East, Islamism, and Indonesia*. Lowy Institute – Australia hal 74

MMI	Ya	Ya	Ya	Tidak
FPI	Ya	Tidak	Tidak	Ya
FKA WJ/LJ	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
HTI	Ya	Ya	Ya	Tidak

Sumber : Marijan, Kacung, 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru*. Kencana : Jakarta hal 322

Fenomena HTI sebagai sebuah gerakan Islam politik cukup menarik. Pasalnya mereka dengan tegas mengatakan bahwa kegiatannya bersifat politik dengan Islam sebagai ideologinya,. Mereka juga secara jelas menyatakan bahwa HTI merupakan partai politik meskipun tidak mengikuti pemilu.

Memang secara harfiah pengertian dari Hizbut Tahrir ialah Partai Pembebasan. Bersumber dari dua kata Bahasa Arab yaitu *Hizb* yang berarti partai dan *Tahrir* yang berarti pembebasan. Dengan ketegasannya untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia melalui pendirian sistem *khilafah* tidak serta merta membuat HTI dikesankan negatif dan minim aktivisme. Seperti yang dikatakan Marijan, gerakan yang dilakukan HTI terus berkembang dan memiliki kaderisasi yang sistematis di perkotaan.

Menjadi menarik karena HTI sebagai sebuah gerakan fundamental masih terus berkembang pesat hingga sekarang. Tidak seperti lima kelompok lainnya, HTI tumbuh lebih pesat. Ditambah pula di awal kemunculannya kebanyakan yang bergabung ke dalam HTI ialah kalangan muslim menengah dan berlatar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini pula yang membuat HTI terlihat berbeda dengan gerakan Islam politik fundamental lainnya yang bergerak secara nonstructural. Padahal gerakan sosial menurut Smelser cenderung merupakan manifestasi kekecewaan irasional individu-individu yang tergabung didalamnya

terhadap sistem sosial masyarakatnya. Tentunya fenomena gerakan HTI yang banyak beranggotakan kalangan berkependidikan terlihat menarik.

Tidak seperti gerakan Islam fundamental lainnya yang cenderung sporadis, HTI bisa dikatakan sangat terorganisir. Mereka memiliki perwakilan kepengurusan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang dan Surabaya. Kecenderungannya memang mereka mewakili perwakilan kepengurusan di kota-kota besar yang memiliki kampus ternama di Indonesia. Dan memang HTI menjadikan kampus sebagai wadah kaderisasi serta penyebaran pemikirannya.

Selain terorganisir, dalam setiap aksi kolektifnya HTI tidak berbuat anarkis. Ini juga sangat berbeda dari gerakan fundamentalis lainnya yang cenderung melakukan tindakan anarkis dalam aksi kolektifnya. Sebut saja FPI yang sering terlihat melakukan aksi *sweeping* hiburan malam menjelang bulan Ramadhan yang berujung kekerasan.

Sementara yang lain, seperti JI. Dan MMI ditengarai melakukan berbagai aksi teror bom di Indonesia sebagai upaya penegakan syariat Islamnya, Salah satunya ialah kasus Bom Bali. Dalam proses penegakan syariat Islam HTI malah menggunakan cara damai seperti demonstrasi dan aksi damai di depan gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk protes. Tentunya sebuah protes yang diarahkan sebagai tuntunan kepada rezim untuk menerapkan syariat Islam.

Dalam perspektif gerakan Islam Politik, apa yang dilakukan MMI dan JI dengan melakukan berbagai aksi teror memang dirasa wajar. Karena dengan aksi tersebut mereka menunjukkan suatu upaya perlawanan terhadap rezim dari luar

sistem partai politik formal. Namun HTI sebagai gerakan Islam politik yang sama fundamentalnya malahan tidak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Mereka konsisten dengan cara damai yang digunakan dalam setiap aksinya. Bagi HTI menyuarkan penerapan syariat Islam ditengah tegaknya sistem demokrasi yang tidak berlandaskan syariat Islam merupakan perlawanan politik.

HTI mulai menunjukkan dirinya di depan publik tepatnya pada tanggal 28 Mei, tahun 2000. Mereka mengadakan konferensi *Khilafah Islamiyah* di Lapangan Tennis *Indoor* Senayan, Jakarta. Aksi masa tersebut dihindari oleh 5000 kader HTI. Selain berfungsi untuk perkenalan aksi tersebut juga sekaligus menjadi ajang *show of force* HTI di depan publik bahwasannya mereka eksis dan memiliki jumlah yang cukup besar. Lagi-lagi ini menunjukkan perbedaan HTI dengan gerakan Islam politik fundamental lainnya.

Meskipun secara tegas bahwa HTI menjadikan Islam sebagai ideologi dan tegaknya syariat sebagai cita-cita mereka tidak lantas menyembunyikan kegiatannya dari publik. Mereka secara terang-terangan menunjukkan kepada publik kegiatan dan aksi kolektif mereka sebagai upaya penegakan sebagai syariat Islam. Sementara gerakan Islam politik lainnya cenderung tidak memperlihatkan kegiatannya sedetail HTI.

Pasca konferensi *Khalifah Islamiyah* tersebut memang belum terlihat aktivisme rutin HTI di depan publik. Eskalasi aktivisme tersebut baru terlihat setelah mereka mengadakan konferensi *Khilafah Islamiyah* yang kedua pada bulan Maret tahun 2002 di Istona Senayan, Jakarta. Konferensi tersebut menghadirkan tokoh-tokoh HTI dari dalam dan luar negeri seperti KH. DR. Muhammad Utsman

dan KH. Muhammad Al-Khathath dari Indonesia, Ustadz Ismail Al Wahwah dari Australia, serta Ustadz Syarifudin M. Zain dari Malaysia. Sangat penting meninjau aksi kolektif suatu gerakan sebagaimana yang ditekankan Kalandersmans bahwa gerakan sosial dilakukan oleh individu-individu yang memiliki cita-cita bersama dan identitas kolektif yang terkait dalam aksi-aksi yang bersifat kolektif.⁸

Berikut beberapa aksi kolektif HTI pasca konferensi *Khilafah Islamiyah* yang kedua dapat dilihat melalui tabel 1.2. Aksi kolektif yang diambil terutama dalam bentuk kegiatan dengan mobilisasi besar di ruang publik. Dengan begitu sekaligus memperlihatkan eskalasi dan pertumbuhan gerakan HTI secara pesat di Indonesia. Karena salah satu indikator gerakan tersebut tumbuh pesat biasanya ditandai dengan jumlah masa dan aksi kolektifnya. Dari aspek tersebut secara tidak langsung juga memperlihatkan kesuksesan mobilisasi suatu gerakan. Aksi kolektif yang mengundang masa HTI dalam jumlah besar tersebut memiliki macam-macam bentuk seperti demonstrasi, konferensi, dan *long march*

Tabel I.2

Aksi Kolektif HTI Pasca Konferensi *Khilafah Islamiyah* ke dua

Waktu	Aksi Kolektif
Maret 2002	Melakukan <i>long march</i> dan mendatangi beberapa kedaulatan besar di Jakarta seperti kedaulatan Besar Arab Saudi dan Inggris sebagai protes terhadap serangan AS terhadap Irak

⁸Bert Klandermans, 1997. *The Social Psychology of Protest*. Blackwell Publisher : Cambridge, Massachusetts hal 2 dalam MuHTiadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS : Suara dan Syariah* Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Agustus 2002	Melakukan aksi kolosal dengan lebih dari 20.000 kader HTI menutu penegakan syariat Islam di depan Gedung DPR dalam Sidang Istimewa DPR.
Oktober 2003	Mengadakan konferensi Islam dalam rangka menyambut Ramadhan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan selainnya.
Februari 2004	Melakukan aksi masa dengan tema “Raih Kepemimpinan dan Tegakkan Syariah dan Khalifah” di Bundaran HI Jakarta yang dihadiri 20.000 kader HTI
Mei 2004	Melakukan aksi protes terhadap perlakuan kejam dan hina tentara pendudukan Amerika Serikat di Penjara Abu Ghuraib, Irak di depan Kedubes Amerika Serikat.
September 2004	Melakukan <i>long march</i> dari Lapangan Monas ke Bundaran HI, Jakarta Dengan rangka menolak kepemimpinan sekuler.
Oktober 2004	Mengadakan <i>long march</i> dan orasi di depan Istan Negara, Jakarta dengan membacakan Piagam Ramadhan yang isinya menutu penegakan syariat Islam di Indonesia.
Desember 2004	Mengadakan <i>long march</i> dengan meneriakkan anti pornografi dan pornoaksi di beberapa kota besar di Indonesia.
Desember 2004	Melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan BBM di beberapa kota besar di Indonesia.

Sumber : Al Wa'ie Edisi 55 Maret 2005

Isu-isu yang menjadi sumber kritik HTI dalam aksi kolektifnya memang merupakan isu sosial yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di zaman Islam mengajarkan pemerintahan tidak seharusnya menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Pengecaman terhadap Amerika Serikat yang mengadakan

invasi ke beberapa negara Islam juga menjadi isu utama. Dan tak lupa isu moralitas seperti pornografi yang masih menjangkiti masyarakat juga dijadikan isu oleh HTI. Isu-isu tersebut terus disuarakan agar masyarakat setuju dengan penegakan syariat Islam di Indonesia.

Menurut HTI Semua hal tersebut disebabkan oleh tidak diterapkannya *Khilafah* dan syariat Islam di Indonesia. Memang seolah-olah apa yang dilakukan HTI bukan merupakan suatu pertentangan politik terhadap rezim. Namun sebenarnya itu merupakan suatu persetujuan politik diruang publik meskipun tidak secara fisik. Singerman menyatakan aktivisme Islam tersebut paling baik digambarkan dalam kaitannya dengan “persetujuan yang tertahan”⁹.

Dan pada tahun 2007 HTI kembali mengadakan konferensi *Khilafah Islamiyah* dengan jumlah yang cukup spektakuler di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Konferensi tersebut dihadiri oleh 100.000 anggota HTI yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Bahkan beberapa perwakilan HTI di luar negeri menyebut konferensi tersebut sebagai *The Biggest Khalifah Convergence Ever*.

Puncak konverensi terbesar dengan jumlah kehadiran anggota yang sangat banyak terjadi pada Juni 2013. HTI mengadakan muktamar kholafah di Gelora Bung Karno Senayan yang diikuti oleh 200.000 anggotanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Muktamar tersebut juga dilakukan di 31 tempat selain di Jakarta. Dalam muktamar dilakukan konsolidasi oleh seluruh anggota HTI yang hadir agar terus berjuang dalam penegakan *khilafah* Islamiyah di Indonesia.

⁹Wiktrowich, Quintan, 2012. *Gerakan Sosial Islam Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Gading Publishing dan Paramadina : Jakarta hal 280

Akta kolektif berupa muktamar tersebut merupakan yang terbesar yang diselenggarakan oleh HTI. Aksi tersebut sekaligus mengabarkan kepada khalayak bahwa HTI eksis, diterima, dan berkembang pesat di Indonesia. Dari muktamar yang diadakan pada Bulan Juni 2013 sekaligus menginformasikan jumlah anggota HTI yang telah melebihi angka 200.000 orang di seluruh Indonesia.

Menariknya dari setiap aksi yang diselenggarakan HTI ialah senantiasa berjalan tertib dan jauh dari anarkisme. Beberapa aktivis HTI menyatakan bahwa mereka cukup mudah mendapatkan izin dari kepolisian untuk menyelenggarakan aksi masa. Sebab kepolisian cenderung mengetahui rekam jejak HTI dalam menyelenggarakan aksi masa di ruang publik yang tertib dan jauh dari anarkisme. Secara tidak langsung mereka juga mendapat simpati dari masyarakat karena mampu menunjukkan diri sebagai penegak syariat Islam yang penuh kedamaian.

Menariknya pula, gerakan HT di negara-negara timur tengah seperti Arab Saudi dan Yordania sangat berbeda dengan di Indonesia. Di kedua negara tersebut HT dikategorikan sebagai gerakan terlarang. Dengan kata lain di sana HT menjadi gerakan bawah tanah. Sehingga perkembangannya bisa dikatakan tidak sepesat di Indonesia.

Perkembangan HTI yang cukup pesat tersebut tak lepas dari peran dakwah kampus sebagai salah satu basis kaderisasi hati. Seperti yang kita ketahui HTI pada awalnya menyebarkan ide-idenya lewat beberapa kelompok pengajian kecil di IPB. Kemudian berkembang ke kampus-kampus besar lainnya seperti UI, UGM, ITB, UNAIR, ITS dan selainnya.

Oleh karena itu HizburTahrir cenderung mengalami perkembangan yang pesat di kota-kota yang memiliki kampus-kampus ternama. Surabaya merupakan salah satunya. Ada dua kampus negeri besar di Surabaya yaitu UNAIR dan ITS. Gerakan HTI di Surabaya juga banyak dilakukan oleh para kadernya yang berasal dari kampus-kampus tersebut.

Bahkan dalam situs resminya HTI memiliki laman yang berjudul HTI *chapter* kampus. Yaitu laman yang berisikan tentang aksi masa HTI yang digalang oleh para mahasiswa. Setiap daerah memiliki laman *chapter* kampusnya masing-masing termasuk Surabaya. Maka Surabaya juga menjadi salah satu basis mobilisasi HTI di Indonesia berikut beberapa aksi kolektif HTI di Surabaya. yang dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel I.3
Aksi Kolektif HTI di Surabaya

Waktu	Aksi Kolektif
11 Januari 2003	Aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM, Tarif Dasar Listrik, dan tarif telepon
25 Oktober 2004	Aksi menuntut penegakan syariat Islam dengan jumlah masa terbesar 1000 orang
22 Desember 2008	Aksi unjuk ras adi depan Gedung Grahadi menolak Kapitalisme dan Liebralisme
6 November 2009	Aksi unjuk rasa did epan Gedung Grahadi menuntut birokrasi yang bersih dengan penegakan <i>Khilafah</i>
15 Maret 2010	Aksi penolakan terhadap kedatangan Presiden AS, Barrack Obama di depan Konjen AS.
10 November 2013	Aksi penolakan terhadap KTI APEC

11 Februari 2014	Aksi kecaman terhadap perayaan valentine yang merupakan awal dari pergaulan bebas
------------------	---

Dihimpun dari berbagai sumber

Dari tabel 1.3 kita bisa melihat bahwa HTI juga eksis melakukan aksi kolektifnya. Sebenarnya masih banyak lagi aksi kolektif yang diadakan HTI di Surabaya. Namun dari sebagian aksi kolektif di atas bisa kita lihat masifnya gerakan HTI di Surabaya. Tentunya aksi-aksi tersebut bisa konsisten terlaksana dengan konsistennya perkembangan gerakan HTI di Surabaya di era reformasi. Oleh karena itu fenomena gerakan HTI di Surabaya menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

- I.2.1. Kondisi politik seperti apa yang melatarbelakangi kemunculan dan format mobilisasi gerakan HTI Surabaya ?
- I.2.2. Bagaimana HTI Surabaya memobilisasi gerakannya di era reformasi ?
- I.2.3. Apa yang menopang kesadaran mobilisasi para aktor gerakan HTI Surabaya sehingga dapat terus berlanjut di era reformasi ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- I.3.1. Mendeskripsikan kondisi politik yang melatarbelakangi perkembangan gerakan HTI Surabaya.

I.3.2. Mendeskripsikan seluruh proses dan dinamika HTI Surabaya dalam memobilisasi gerakannya di era reformasi.

I.3.3. Mendeskripsikan pemahaman pikiran yang membentuk mobilisasi para aktor gerakan bagi perkembangan gerakan HTI Surabaya di era reformasi.

I.4. Manfaat Penelitian

Secara akademis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperdalam penggunaan teori gerakan sosial. Terutama teori-teori gerakan sosial yang menjelaskan keterhubungan antara gerakan sosial Islam dengan ilmu politik.

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi penggiat studi gerakan Islam politik sebagai suatu pembandingan. Dan bermanfaat pula bagi suatu rezim dalam melihat pola gerakan Islam politik di kota-kota besar Indonesia.

I.5. Kerangka Konseptual

I.5.1. Gerakan Sosial sebagai Upaya Politik

Istilah gerakan sosial muncul pertama kali dalam studi mengenai aksi kolektif. Yaitu studi dalam bidang psikologi sosial yang membahas fenomena berbagai bentuk aksi kolektif yang terjadi di masyarakat lewat sudut pandang psikologi. Wilkinson mengartikan gerakan sosial sebagai berikut :

Usaha kolektif yang disengaja untuk mempromosikan perubahan dalam suatu cara dan maksud, tidak mengecualikan kekerasan keilegalan, revolusi, atau kemunduran menuju komunitas utopis.¹⁰

¹⁰Paul Wilkinson Dalam Tilly, Charles, 1978. *From Revolution to Mobilization*, New York : Random House. Hal. 39.

Lebih jauh lagi Wilkinson menyatakan bahwa gerakan sosial juga menunjukkan sebagai aksi kolektif yang terorganisir. Tidak seperti kerumunan yang tanpa tujuan dan kesadaran bersama para aktornya. Masih menurut Wilkinson, Gerakan sosial juga muncul karena suatu sebab yaitu sebuah komitmen untuk mengubah keadaan berdasarkan kesadaran dan harapannya.

Dari pengertian Wilkinson tersebut gerakan sosial masih terlihat sebagai fenomena psikologi sosial. Artinya sebagai bentuk ungkapan keketidaksetujuan atau kekecewaan masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada. Belum jelas arahnya apakah diarahkan untuk berseteru dengan sistem dan kekuasaan atau tidak.

Sementara Snow dan Soule mengatakan bahwa gerakan sosial memiliki lima elemen yaitu sebagai berikut :

Pertama gerakan sosial senantiasa menentang atau mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Kedua mereka kecenderungan bersifat kolektif daripada individual. Ketiga mereka bertindak dalam tingkatan yang berbeda-beda di luar institusi sosial dan organisasi formal. Keempat mereka bergerak melalui tingkatan organisasi yang berbeda-beda. Dan kelima mereka bergerak secara kontinyu dengan tingkatan yang berbeda-beda.¹¹

Dari kelima elemen tersebut Snow dan Soule mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif dengan variasi derajat keorganisasian dan kontinuitas, sebagian berada di luar institusi formal dengan tujuan menentang sistem atau kekuasaan yang ada dan berusaha menggantinya dengan suatu sistem sosial dan kultur baru yang telah tertanam dalam kelompok mereka.

Sebenarnya dari pemaparan Snow dan Soule di atas kita bisa simpulkan bahwa gerakan sosial merupakan salah satu upaya politik. Sebab dengan jelas Snow dan Soule mengartikan gerakan sosial sebagai kelompok yang menentang

¹¹Snow, David A and Sarah A Soule. 2010. *"A Primer on Social Movement"*. London W.W. Norton & Company hal 6.

kekuasaan dan berupaya merubah sistem dari kekuasaan yang ada sesuai harapan mereka. Namun itu semua dilakukan dalam kerangka nonkonstitusional. Artinya, dilakukan dengan tidak memasuki sistem politik formal melalui jalur pemilu dan parlemen. Biasanya aksi kolektifnya dilakukan dalam bentuk demonstrasi, penandatanganan petisi dan selainnya dengan tujuan mempengaruhi persepsi publik hingga sepakat dengan apa yang gerakan tersebut tawarkan. Hal inilah yang kemudian dikatakan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly sebagai politik persetujuan yang bersifat publik.¹²

Gerakan sosial sebagai bagian dari upaya politik diperjelas kembali oleh deskripsi Tilly. Sejarah pembentukan gerakan sosial berawal dari dunia barat. Seperti pembentukannya di Barat, pada 1750, Tilly dalam bukunya mengatakan bahwa gerakan sosial muncul dari tiga elemen yang inofatif dan penuh konsekuensi yaitu :

1. Upaya publik yang terorganisir dan berkelanjutan yang membuat klaim bersama dan diarahkan pada target kekuasaan tertentu.
2. Pengejawantahan kombinasi yang terdiri dari berbagai macam aksi politik seperti pembentukan tujuan khusus, berkoalisi, mengadakan pertemuan publik, prosesi yang khidmat dalam kegiatannya, senantiasa sigap untuk melakukan demonstrasi, membuat petisi, memberikan pernyataan publik di media, menyebarkan ide lewat pamflet.
3. Para anggotanya bekerja sama mewakili kemanfaatan, kesatuan, jumlah, dan komitmen para pendukung mereka (*Worthiness, unitary, numbers, commitment*)¹³

Tidak seperti petisi dan deklarasi dalam satu kali penyelenggaraan. Meskipun gerakan sosial sangat berkaitan dengan dua hal tersebut.

Deskripsi Tilly mengenai gerakan sosial tidaklah berbeda dengan Snow & Soule. Mereka sepakat mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif

¹²Wiktrowich, Quintan, 2012, *Gerakan Sosial Islam Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Gading Publishing dan Paramadina : Jakarta hal 280

¹³Tilly, Charles. 2004. "*Social Movement, 1768-2004*". London Paradigme Publisher hal. 3

yang berkelanjutan dan terorganisir sebagai upaya politik pertentangan terhadap sistem dalam suatu rezim. Tentunya mereka bergerak di luar institusi politik formal. Tilly lebih tegas dalam mendeskripsikan bentuk-bentuk aksi kolektif dari gerakan sosial seperti demonstrasi, menandatangani petisi, dan menyebarkan ide lewat pamflet.

Masih menurut Tilly, gerakan sosial juga lekat dengan kampanye. Kampanye dalam gerakan sosial selalu berhubungan dengan tiga hal yaitu klaim yang telah dibentuk secara kelompok, mengarahkan klaim pada target tertentu, dan membawa pesan kebaikan yang harus dijalankan. Target lain atau tuntutan biasanya pemerintah, tetapi bisa juga ditujukan kepada pengusaha, pemuka agama, dan siapa saja yang gagal dalam menyelenggarakan kesejahteraan publik. Lagi-lagi ini dilaksanakan bukan hanya petisi satu hari tetapi sifatnya berkelanjutan dan terintegrasi antara aksi satu dengan lainnya dalam satu tujuan.

Antara Tilly, Snow dan Soule, serta Wilkinson memiliki kesamaan dan perbedaan dalam mendefinisikan gerakan sosial. Kesamaannya ialah mereka sepakat akan aksi kolektif yang disadari oleh tujuan tertentu untuk mengubah keadaan sebagai konsep kunci dalam gerakan sosial. Namun Wilkinson lebih melihat pada sisi psikologi sosialnya sedangkan Tilly serta Snow dan Soule melihat lebih dari sekedar fenomena psikologis semata. Mereka melihat gerakan sosial merupakan bagian dari politik sebab ada upaya berseteru dengan kekuasaan di dalamnya. Itulah mengapa gerakan sosial tidak bisa hanya dilihat sebagai fenomena psikologi sosial saja tetapi ia juga merupakan fenomena politik.

Gerakan sosial juga identik dengan adanya klaim dalam tiga bentuk yaitu identitas, program, dan status atau kedudukan¹⁴. Klaim program menunjukkan wujud konkrit gerakan dalam mencapai tujuannya. Identitas bertujuan untuk melekatkan para anggotanya sebagai bagian dari gerakan sosial tersebut. Sementara klaim status atau kedudukan merupakan penyebaran ikatan yang terjadi di antara anggota gerakan sebagai suatu kesatuan gerakan yang memiliki tujuan sama. Klaim program, identitas, dan status yang diarahkan kepada kelompok yang digugat bisa bermacam-macam antara gerakan yang satu dengan yang lainnya.

Gerakan sosial memiliki repertoar dari aksi dan kegiatan yang dilakukannya. Repertoar dari gerakan sosial berjalan seiringan dengan repertoar fenomena politik lainnya seperti aktivitas perdagangan global dan kampanye pemilu. Pada abad ke dua puluh, asosiasi-asosiasi yang bertujuan khusus memulai berbagai bentuk aksi politik secara besar-besaran diseluruh dunia. Tetapi sesungguhnya integrasi dari itu semua merupakan penanda munculnya gerakan sosial sebagai format politik baru.

Pada abad ke 19 dan 20, banyak negara yang diresmikan Gereja mengakui keberadaan gerakan sosial selama mereka tidak melawan doktrin Gereja sebagai hak berkumpul dan berserikat bagi masyarakat. Terkadang kelompok separatis, kelompok politik baru, dan kelompok religi baru muncul menentang rezim meskipun rezim menyikapi mereka secara represif. Namun kemunculan mereka sangatlah sedikit. Partisipasi dalam gerakan sosial kemudian berubah dalam bentuk yang variatif. Yaitu mulai memasuki arena politik dalam bentuk pengadaan kampanye politik, mendirikan perserikatan buruh, membentuk kelompok

¹⁴Tilly, Charles, 2004. *"Social Movement, 1768-2004"* London : Paradigm Publisher hal 12

kepentingan yang jangka panjang, menjadi sekte dalam religi, dan membentuk kelompok separatis. Fenomena ini memang dipengaruhi oleh berubahnya formasi hukum dan politik, terutama sejak tahun 1750.

Banyak orang menggunakan istilah gerakan sosial ketika merujuk realitas protes, penolakan, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan pemahaman istilah gerakan sosial mulai muncul ketika aktivitas politik publik mulai menemukan beberapa bentuknya lewat beberapa protes yang dilakukan. Ada banyak bentuk gerakan mulai dari kerusuhan, gerakan damai, hingga penjarahan. Pada intinya mereka mencoba memberikan efek kepada dunia sebagai gerakan sosial yang mampu mempengaruhi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan. Mereka melibatkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam melakukan aksi kolektifnya dan dilakukan tidak hanya sekali namun berkelanjutan.

Memang cukup membingungkan dalam mengartikan gerakan sosial. Karena dia diapit oleh aspek sosiologi dan politik. Untuk itu dapat diperjelas dengan melihat sejarahnya. Pada awal abad ke 19 di barat, muncul perbedaan dengan dunia lainnya dalam mewujudkan kepentingan publik. Mereka yang mencoba mewujudkan kepentingan publik mengonsolidasikan dirinya dalam suatu perkumpulan. Perkumpulan tersebut bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Lama kelamaan cara ini menyebar di daratan Eropa Barat dan Amerika Utara. Cara seperti ini pada akhirnya disebut dengan mengadakan gerakan sosial.

Sebagai konsekuensinya gerakan sosial juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk kombinasi partisipasi politik. Kombinasi partisipasi politik dengan

mengadakan gerakan sosial ini terdiri dari tiga elemen penting. Menurut Tilly kombinasi tersebut ialah :

Pertama yaitu mengampanyekan pernyataan kolektif kepada target kekuasaan atau mereka yang memiliki otoritas. Kedua, menunjukkan klaim bersama yang dibuat dengan aktivitas-aktivitas seperti unjuk rasa, diskusi publik, pernyataan di media, dan demonstrasi. Ketiga ialah menunjukkan representasi kepentingan publik lewat para anggotanya yaitu dari sisi jumlah, atribut, atau kepentingan yang disuarakan dan kebersamaan anggotanya.¹⁵

Gerakan sosial pada akhirnya menyebar luas ke seluruh daratan Eropa dan Amerika dengan berbagai macam bentuk. Dari mulai yang koersif hingga penuh kedamaian. Ini cukup membingungkan para sarjana yang menelitinya. Para sarjana mengatakan gerakan sosial merupakan salah satu bentuk aktivitas politik yang unik. Keunikannya terletak pada beragamnya bentuk gerakan sosial itu sendiri. Ada yang berbentuk long march, demonstrasi, kekerasan, dan sebagainya. Namun pada intinya gerakan sosial merupakan bentuk nyata dari konflik politik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Sejarah gerakan sosial memang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari politik. Ia merupakan wajah dari pertentangan politik. Ketidaksetujuan masyarakat dengan pemerintah seringkali merupakan awal lahirnya gerakan sosial. Melalui sejarah gerakan sosial kita dapat mengetahui bentuk-bentuknya dan apa saja yang dapat memicunya. Ada beberapa hal yang cukup membingungkan dalam gerakan sosial. Awalnya para ahli melihat gerakan sosial sebagai konflik politik antara pemerintah dengan masyarakat yang letaknya berada di luar arena politik resmi seperti pemilu.

¹⁵Tilly, Charles, 2004. "*Social Movement, 1768 – 2004*" London : Paradigm Publisher hal 7

Namun sejarah gerakan sosial menunjukkan fakta yang berbeda. Ada beberapa gerakan sosial yang bertransformasi di dari gerakan turun ke jalan menjadi gerakan sosial yang memperjuangkan kepentingan di area politik resmi. Singkat kata mereka membentuk partai politik untuk memperjuangkan kepentingan dalam menyerang target kekuasaan.

Sebenarnya dalam kondisi diatas gerakan sosial tetap berlanjut selama dia tetap melaksanakan aksi kolektifnya dalam ranah noninstitusional seperti protes dan demonstrasi di ruang publik. Partai hanya merupakan salah satu manifestasi upaya politik dari gerakan sosial tersebut. Dan tidak serta merta menghilangkan identitas gerakan sosialnya.

Sehingga Tilly secara gamblang dalam bukunya menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan bagian dari upaya politik masyarakat untuk menentang kekuasaan. Upaya tersebut banyak pula didukung oleh kalangan agama sebagaimana banyaknya gerakan religi yang bersifat politik yang berkembang di era reformasi ini.

I.5.1 Gerakan Sosial Berbasis Religi

Berawal dari Zald yang menyatakan bahwa pengaruh dalam kehidupan sosial semakin kuat¹⁶. Zald mengatakan pula bahwa religi merupakan salah satu institusi yang memfasilitasi gerakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu Zald mengatakan pula bahwa sosiologi agama dan sosiologi gerakan sosial dapat dipadukan dalam

¹⁶Snow, David A, Sarah A Soule and Hanspeter Kriesi. *"The Blackwell Companion to Social Movement"*. Oxford : Blackwell Publishing hal 694

kesatuan pembahasan. Terutama sejak 1981, proses dalam penulisan literatur gerakan sosial semakin meningkat. Khususnya perbincangan mengenai peranan kultur dan ideologi dalam gerakan sosial. Terjadi banyak perbincangan pula yang mengaitkan hubungan antara religi dan gerakan sosial yang semakin meluas. Ditambah pula dengan kemunculan fenomena sekularisasi politik yang semakin meluas, justru semakin menambah kemunculan gerakan sosial berbasis agama.

Pada tahun 1970-1980an gelombang gerakan religi baru bermunculan dimana-mana. Ini mungkin merupakan kebangkitan dari gerakan fundamentalis di seluruh dunia dalam merespons globalisasi dan ketegasan sosial ekonomi dalam era kapitalisme yang berlangsung saat itu.

Yang tercatat yaitu kebangkitan ambisi politik fundamentalis di Iran, Afghanistan, dan sepanjang Dunia Arab. Tetapi gerakan fundamentalis juga muncul pada religi dibelahan dunia timur seperti Hinduisme dan Shikhisme. Berikutnya, gerakan fundamentalis dipandang sebagai konsep yang menentang dalam studi gerakan sosial.

Istilah fundamentalis lekat dengan asosiasi kekerasan dan teror. Sebenarnya pengertian fundamentalis ialah upaya-upaya yang berkaitan dengan pengembalian kepada kepercayaan dasar. Namun kemudian makna ini bergeser pada pemaknaan pejoratif barat yaitu sebagai bentuk-bentuk aktivisme Islam yang meneror. Sehingga fundamentalis tidak selalu bermakna teror. Fundamentalis dapat disejajarkan dengan istilah Islamis.

Terdapat dua poin yang dijadikan penekanan dalam melihat gerakan fundamentalis kontemporer. Pertama, mereka merupakan respons dari proses

perubahan sosial yang sama sebagai bentuk gerakan religi baru seperti yang telah didiskusikan sebelumnya. Khususnya dalam pemisahan wilayah publik dan privat atas kejatuhan identitas tradisional yang telah menguasai pemahaman akan publik dan privat di masyarakat. Gerakan fundamentalis juga memikat secara umum karena menunjukkan perbedaan kelas sosial dengan yang lainnya. Banyak dari mereka yang tertarik akan gerakan fundamentalis berasal dari kelas menengah dan menengah atas. Dan sekaligus mereka merupakan orang-orang terdidik dari kalangan kelas baru profesional yang terbentuk pada era kapitalitas sekarang.

Kedua, gerakan fundamentalis mengorganisasikan isu yang sama dengan gerakan sosial baru terutama yang menyangkut gender dan identifikasi seksual. kedepannya ini akan membantu para sarjana dalam mengkaji gerakan sosial baru lebih luas dengan mempertimbangkan gerakan fundamentalis sebagai salah satu bentuknya. Mereka semua merupakan produk yang sama dalam menyikapi perubahan global dalam masyarakat dunia saat ini. Hanya saja perbedaannya ialah gerakan fundamentalis kontemporer menyuarakan permasalahan yang bervariasi dalam satu kesatuan lingkaran ideologi.

Gerakan-gerakan fundamentalis menjangkau secara luas jaringan-jaringan informal. Namun begitu mereka juga sukses dalam memobilisasi jaringan-jaringan tersebut ke dalam bentuk organisasi yang lebih besar. Gerakan-gerakan fundamentalis menarik untuk dikaji. Terutama tema penelitian mengenai bagaimana mereka mentransformasikan jaringan-jaringan informal menjadi formasi politik yang besar dan kokoh.

Hal penting lainnya dalam menelaah gerakan sosial baru, khususnya dalam bentuk religi ialah konsentrasi mereka dalam proses ideologisasi dan mobilisasi sumber daya simbolik mereka. Kekhasan mereka dalam manipulasi ideologisasi dan mobilisasi sumber daya simbolik akan mampu menjawab kebingungan-kebingungan kita terhadap mereka. Ziad Munson sebagai contoh, melakukan studi terhadap Ikhwalnul Muslimin di Mesir pada tahun 2001 untuk mengkaitkannya dengan teori gerakan sosial khususnya pada aspek framing.

Gerakan religi sendiri tidak hanya berwajah satu. Ternyata dalam gerakan religi terdapat pemahaman religi yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ini bisa disebut dengan istilah gerakan intrareligi. Fenomena ini muncul disebabkan oleh pemahaman simbol-simbol religi yang berbeda antara satu dengan aktor lainnya di dalam gerakan religi.

Perbedaan pemaknaan ini tentu membawa respons terhadap problem sosial yang sedang dihadapi. Padahal pemaknaan awal akan problem sosial lewat tafsiran simbol-simbol religi merupakan nyawa pembentuk suatu gerakan religi. Jika terjadi perbedaan pemahaman simbol maka dipastikan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang dicontohkan pada gerakan religi kristen di AS. Ada beberapa kelompok yang akhirnya memperbolehkan aborsi. Padahal golongan evangelis yang sudah lama menguasai proses politik pemerintahan menentang habis-habisan hal tersebut. Maka muncullah gerakan baru dalam gerakan religi kristen di AS.

Dalam Islam sendiri juga terdapat berbagai kelompok gerakan religi. Di Mesir terkenal dengan Ikhwalnul Muslimin (IM). Di Palestina salah satu yang

terkenal ialah Hizbut Tahrir (HTI). Keduanya merupakan gerakan fundamental yang memiliki perbedaan pemikiran dan strategi.

Pembahasan-pembahasan di atas mengarahkan pada pembahasan hubungan antara religi dan politik. Literatur gerakan-gerakan sosial telah sengaja mengolah penyebab awal dari keterlibatan religi di dalam gerakan sebagai sebuah variabel yang berasal dari luar. Meskipun para peneliti telah meneliti efek dari politik religi secara serius tetapi sebenarnya mereka belum melakukan penelitian mendalam mengenai religi itu sendiri.

Namun hal yang tegas dapat kita temukan di sini bahwasannya agama melalui simbol-simbol religinya mampu memberikan pemaknaan-pemaknaan yang terdiri atas problema sosial di dalam masyarakat tertentu. Simbol religio agama tidak jarang menyentuh aspek paling publik di masyarakat yaitu negara. Oleh karena itu agama sering kali mencoba memengaruhi berjalannya sistem negara yang berhasil dikuasai oleh gerakannya.

Seperti yang dicontohkan oleh beberapa gerakan fundamentalis Islam, yaitu berusaha memberikan pemaknaan akan konsep negara kepada para anggotanya. Sementara itu dalam hubungannya dengan gerakan sosial lainnya, agama mampu menjadi inspirasi bagi gerakan lainnya. Karena otoritas agama memiliki peran yang kuat dalam masyarakat. Tidak hanya menjadi inspirasi tetapi juga menjadi penunggang gerakan religi demi memperkuat kepentingan gerakannya.

I.5.3. Gerakan Islam Politik Fundamentalis

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa agama dapat menjadi salah satu inspirasi bahkan ideologi gerakan sosial. Islam sendiri menjadi inspirasi berbagai gerakan sosial. Dewasa ini kemunculan gerakan Islam politik menjadi fenomena yang menarik. Hampir setiap gerakan Islam politik mengawali kemunculan dari kawasan Timur Tengah. Beberapa gerakan Islam politik yang cukup besar di dunia ialah Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir.

Meminjam istilah dari Masdar Hilmy, gerakan Islam politik atau gerakan Islamis secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai ideologi. Artinya mereka memandang Islam bukanlah semata-mata agama ritual. Bagi mereka Islam adalah sebuah tatanan nilai yang mengatur jalannya seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ke aspek sosial seperti ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu mereka kaum Islamis mencoba mengejawantahkan ideologi Islam dalam masyarakat. Bagi mereka Islam hanya akan bisa tegak jika dijadikan landasan dalam kehidupan manusia. Aktivitas Islam harus masuk ke ranah sosial politik. Tidak bisa Islam dipisahkan dari kehidupan negara. Bahkan negara haruslah berlandaskan nilai Islam.

Hampir seluruh gerakan Islamis berangkat dari pemikiran *salafi*. Yaitu pemikiran yang mencoba mengembalikan Islam pada sumber utamanya yakni Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber yang paripurna dalam Islam. Sebab Tuhan dan Nabi tak mungkin salah. Gerakan *salafi* ini muncul akibat berkembangnya

tradisionalisme Islam yang mengagumkan ulama-ulama tradisional daripada dua sumber utama tersebut.

Dalam perkembangannya arus modernisme yang kemudian menjadi musuh utama bagi umat Islam. Maka kaum Islamis mati-matian memperjuangkan Islam *vis a vis* sekularisme barat. Mereka kemudian membuat penggolongan sebagai berikut

Menurut mereka masyarakat yang terdiri dari orang-orang Islam saja tidak cukup, tetapi juga harus Islami dalam landasan maupun strukturnya. Perbedaan pun dipertegas antara apa yang “muslim” dan apa yang “Islami”. Sesuatu perbedaan yang dialami dalam hal ini mengabsahkan; penggunaan kata “Islamisme”.¹⁷

Maksud dari penggolongan tersebut ialah memang dalam suatu negara terdapat banyak muslim, yaitu orang yang beragama Islam. namun tidak semua muslim merupakan kaum Islamis. Sebab istilah Islamis hanya diasosiasikan kepada muslim yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi. Dimana perjuangkan senantiasa melalui jalur politik dengan membentuk pemerintahan yang berlandaskan nilai Islam.

Fenomena gerakan Islamis muncul dalam dua arus utama Islam yaitu Sunni dan Syiah. Gerakan Islamis Syiah lebih dahulu menunjukkan kesuksesannya dalam menggulingkan rezim sekuler Syah Pahlevi. Mereka menggantinya dengan negara Islam yang dipimpin ulama kharismatik, Ayatullah Khomeini. Sementara gerakan Islamis sunni dipimpin oleh kalangan intelektual yang bukan ulama. Contohnya seperti Ikhwanul Muslimin (IM) yang dipimpin oleh Hasan Al Banna dan Hizbut Tahrir (HT) yang dipimpin oleh Taqiyudhin An Nabhani. Gerakan Islamis sunni

¹⁷Roy, Olivier, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta Serambi hal 43

inilah yang kemudian membawa pengaruh besar dalam penyebaran gerakan Islamis di seluruh dunia.

Gerakan Islamis sunni berangkat dari pemahaman Al Qur'an dan sunnah secara politik. Di dalam Al Qur'an misalnya terdapat beberapa ayat yang menyatakan bahwa hanya Allah lah yang diperbolehkan membuat hukum dan dilarang memberikan ketaatan kepada pemimpin yang bukan Islam. Pemimpin yang bukan Islam diartikan sebagai pemimpin yang tidak memperjuangkan ideologi Islam tentunya.

Tafsiran Al Qur'an tersebut diperkuat dengan pemahaman sunnah yang dipahami secara politik pula. Dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfungsi menyeru ke dalam ajaran-ajaran Islam. Tetapi dakwah rasul juga bertujuan untuk merebut kekuasaan dari orang-orang kafir lalu menggantinya dengan kekuasaan Islam, yang menjadikan nilai Islam sebagai landasannya.

Dakwah rasul dilihat sebagai proses ideologisasi masyarakat dengan membentuk suatu komunitas besar yang berpegang pada nilai Islam. Komunitas besar inilah yang hingga sekarang dikenal dengan istilah "umat". Rasul ketika di Mekah hanya berdakwah kepada sebagian orang lalu hijrah ke Madinah dan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sana. Inilah awal mula kemunculan konsep negara Islam yang sebenarnya mengacu pada negara Madinah dimana Islam menjadi ideologi negara.

Kaum Islamis memiliki sudut pandang yang berbeda dengan ulama-ulama tradisional yang menjadikan penerapan Islam sebagai tujuan yang Final. mereka memandang Islam sebagai suatu tatanan yang mengatur seluruh kehidupan

manusia. Maka dari itu proses ideologisasi lebih mendesak daripada terburu-buru untuk menegakkan syariat Islam. Sebab syariat hanya bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kesadaran ideologi Islam.

Gerakan Islamis sendiri memiliki perbedaan dalam memanasifestasikan cita-cita gerakannya. Ada yang masih bisa berkompromi dengan sistem barat seperti demokrasi dan negara bangsa. Sehingga gerakan diartikulasikan dengan membentuk partai politik yang ikut berkontestasi dalam pemilu seperti yang dicontohkan Hasan Al Banna dalam memperjuangkan cita-cita gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Meskipun IM menerima ide demokrasi dan negara bangsa milik barat, tetap saja gerakannya dikategorikan sebagai gerakan Islam politik Fundamentalis. Sebab dibalik penerimaannya terhadap demokrasi terdapat cita-cita untuk menerapkan syariat Islam secara tekstual setelah berhasil merebut kekuasaan. Singkat kata mereka hanya memanfaatkan demokrasi untuk mencapai kekuasaan.

Ada pula yang tegas menolak berkompromi dengan sistem sekuler barat. Mereka inilah yang kemudian disebut gerakan Islam politik fundamentalis yang ekstrim. Istilah fundamentalis ekstrim memang dekat dengan terorisme. Namun sebenarnya ekstrim tidaklah seperti itu. Fundamentalisme ekstrim merujuk pada gerakan pemurnian kristen protestan dalam menafsirkan Injil melawan kaum modernis yang lebih liberal.

Gerakan Islam politik fundamentalis ekstrim sendiri terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama yang digawangi oleh Sayid Quthb, dimana ia memandang hanya ada dua negara yaitu negara kafir (*darul kufir*) dan negara Islam (*darul Islam*). *Darul kufir* ialah negara yang pemerintahannya tidak berlandaskan nilai Islam

sedangkan *darul Islam* ialah negara yang pemerintahannya berlandaskan nilai Islam. Bagi kaum Islamis yang berada di *darul kufir* maka wajib hukumnya untuk memberontak. Jika tidak bisa maka bermigrasi ke *darul Islam*.

Kubu kedua yaitu HT yang digawangi oleh Taqiyudhin An Nabhani. Bagi dia tidak ada negara Islam saat ini karena negara Islam hanya memiliki satu bentuk yaitu *khilafah* yang melewati batas-batas negara bangsa. Maka dari itu yang perlu dilakukan ialah proses penyadaran umat untuk kembali ke nilai-nilai Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasul di Mekkah. Konsep jihad dan penerapan syariat Islam baru dijalankan ketika negara *khilafah* seperti masa Rasul di Madinah terbentuk. Maka sebelum negara *khilafah* terbentuk konsep jihad yang mengandung kekerasan fisik tidak dibenarkan. Sebab instruksi jihad hanya boleh dikeluarkan oleh negara *khilafah*. Aspek fundamental dari kubu ini ialah pembacaan sunnah Rasul yang tekstual.

Bagi gerakan Islam politik Fundamentalisme kemunduran umat Islam terjadi karena terlepasnya ideologi Islam di tubuh umat. Konsekuensinya ialah penerapan nilai-nilai sekularisme oleh umat. Maka dari itu penegakkan ideologi Islam adalah harga mati. Tentu dengan tidak berkompromi dengan sistem-sistem barat. Praktis Islam juga menjadi ideologi gerakan yang menyatukan seluruh aktor gerakan

I.5.4 Teori Gerakan Sosial Neil J Smelser

Smelser tergolong teoritis gerakan sosial awal. Pendekatan awal atau klasik dalam memotret gerakan sosial memang erat dengan perspektif psikologi sosial, terutama dari sudut pandang fungsionalismenya. Secara umum pendekatan klasik

dalam gerakan sosial cukup terepresentasikan oleh teori smelser. Pendekatan ini cenderung menggambarkan gerakan sosial sebagai respons kekecewaan terhadap sistem dan struktur sosial di masyarakat. Kekecewaan tersebut pun disalurkan dalam bentuk protes yang pada akhirnya membentuk suatu gerakan sosial.

Pendekatan ini cenderung melihat gerakan sebagai tindakan irisonal karena kekecewaan tersebut tidak disalurkan melalui prosedur institusi formal. Gerakan sosial dipercaya sebagai obat penyembuh sementara perasaan anomie yang dialami oleh mereka yang tidak puas terhadap struktur sosial. Selain itu dalam pendekatan ini gerakan sosial dipandang sebagai suatu hal yang pasif dan tidak determinan. Karena itu berada dalam pengaruh sistem dan struktur sosial sepenuhnya. Maka secara tak langsung pendekatan ini mengatakan bahwa gerakan sosial akan hilang dengan sendirinya ketika sistem dan struktur sosial sudah berubah dan mampu mengendalikan mereka.

Smelser berhasil menemukan enam faktor determinan penyebab muncul dan berlangsungnya gerakan sosial. Menurut smelser keenam faktor tersebut saling terkait dalam memicu berlangsungnya gerakan sosial.

Pertama, yaitu *structura conduciveness*. Gerakan sosial bermula dari adanya struktur sosial yang mendukung. Semisal ketidakstabilan perekonomian yang terjadi yang berakibat meningkatnya harga kebutuhan pokok. Sementara kemiskinan juga masih tinggi. Dalam kondisi tersebut rawan terbentuk sebuah protes masa yang mengarah pada terbentuknya suatu gerakan sosial. Contohnya gerakan mahasiswa yang terbentuk di era reformasi 1998.

Kedua yaitu *struktural strain*. Gerakan sosial semakin tidak terbendung bila struktur kondusif menimbulkan ketegangan struktural. Pada intinya ketegangan struktural terjadi akibat akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap struktur kondusif. Sebab dalam tahapan *structural condusif* kekecewaan publik mulai terbentuk.

Ketiga yaitu *the growth of generalized believe*. Menurut Smelser ketegangan struktur belum mencukupi dalam menghasilkan suatu aksi kolektif. Agar gerakan sosial bisa diwujudkan diperlukan penjelasan mengenai solusi permasalahannya. Dalam tahapan ini, interaksi sosial antara individu-individu yang kecewa sangat diperlukan. Dengan adanya interaksi sosial yang intensif maka akan timbul kesempatan untuk saling bertukar pikiran dalam merespon permasalahan yang dihadapi bersama.

Keempat yaitu *precipitating factors*. Dari segi waktu, gerakan sosial seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi gerakan sosial bisa dipercepat jika ada faktor yang mendukungnya. Faktor-faktor tersebut bisa berupa peristiwa dan bisa juga dalam bentuk kehadiran tokoh kharismatik.

Kelima yaitu *mobilization*. Bisa dikatakan inilah manifestasi nyata dari gerakan sosial. Yaitu mobilisasi masa yang menghasilkan aksi kolektif berkelanjutan. Mobilisasi sangat tergantung pada tersedianya kelompok yang bisa diorganisasi dan mobilisasi. Selain itu juga sangat bergantung pada pimpinan, komunikasi antar anggota, dan suplai dana bagi aksi kolektif yang kontinu.

Keenam yaitu *operation of social control*. Tidak seperti kelima tahapan sebelumnya, tahapan ini justru bersifat mencegah terus berlangsungnya suatu

gerakan sosial. Kontrol ini biasanya dilakukan oleh negara. Terdapat dua bentuk kontrol dari negara. Pertama bentuk upaya pencegahan terhadap munculnya aksi kolektif dengan cara mengurangi faktor pendukung dan ketegangan struktural seperti melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontrol kedua berupa menetapkan aksi kolektif setelah gerakan dimulai seperti mengerahkan polisi dan menerapkan jam malam. Tetapi dalam banyak kasus tekanan ini kurang efektif. Sebab semakin mendapat tekanan malah semakin mendukung gerakan sosial. Karena secara tidak langsung memelihara kekondusifan dan ketegangan struktur. Sehingga masa tetap dituntut melakukan proses dalam kondisi tersebut. Dari pemaparan Smelser sangat terlihat bahwasanya aktor-aktor gerakan sosial sangat terikat dengan peranan struktur. Aktor bukanlah individu aktif yang merancang gerakan sosial secara kontinu.

I.5.5. Teori Gerakan Sosial Doung McAdam

McAdam menggolongkan gerakan sosial sebagai bentuk perseteruan politik. Artinya gerakan merupakan suatu entitas pertentangan politik antara aktor gerakan dan rezim. Deskripsi gerakan semacam ini secara tak langsung mendefinisikan gerakan sosial sebagai salah satu upaya politik. Konsekuensinya ialah gerakan merupakan sekelompok individu yang aktif. Tidak pasif dan tidak pula terdeterminasi sepenuhnya oleh kekecewaan terhadap struktur. Tidak hanya itu, aksi kolektif dalam gerakan sosial pada akhirnya juga dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan pertimbangan rasional oleh para aktornya. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi struktural yang ada.

McAdam memotret gerakan kulit hitam di Amerika untuk menjelaskan kerangka teori awal. Kerangka gerakan sosial ini dikenal dengan *political process Model*. *Political Process Model* (PPM) merujuk pada gerakan sosial kulit hitam di Amerika Serikat (AS) untuk memperjuangkan haknya. McAdam melihat protes yang dilakukan gerakan ini tidak hanya sekedar mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sistem politik saat itu, lebih dari itu aktor-aktor gerakan secara nyata berupa menentang otoritas pemerintah. Mereka menyusun serangkaian aksi kolektif untuk mempengaruhi kebijakan.

Kerangka teori mengacu pada model elite di AS pada saat itu. Dimana segelintir orang menguasai sebagian sumber daya ekonomi dan politik. Maka mereka yang tidak mendapatkan akses menuju sumber daya tersebut merasa kecewa. Kekecewaan tidak hanya diutarakan secara sporadis. Oleh sebab itu gerakan sosial dalam seluruh perspective, sebagai upaya rasional oleh kelompok terbuang untuk memobilisasi sumber dayanya yang dimiliki, kemudian dikelola dengan baik untuk mencapai kepentingan kolektif melalui jalur noninstitusional¹⁸.

Selain merujuk pada model elite, PPM juga memiliki kaitan dengan model marxist. Marxist mengakui bahwa kesenjangan kekuasaan diantara elite dan kelompok terisih itu substansi permasalahan namun hampir pasti peran negara dalam hal itu tak terhindarkan¹⁹. Artinya PPM juga mengasumsikan bahwa disparitas yang muncul diakibatkan desain struktur ekonomi dan politik oleh negara.

¹⁸McAdam, Doug, 1982. *Political Process and The Development of Black Insurgency 1930-1970*. The University of Chicago Press : Chicago hal 37

¹⁹McAdam, Doug, 1982. *Political Process and The Development of Black Insurgency 1930-1970*. The University of Chicago Press : Chicago hal 38

Para teoritis gerakan marxist pun berupaya membangun konstruksi bahwa mobilisasi dapat berlangsung secara konsisten ketika seluruh aktornya memiliki kesadaran penuh terhadap kondisi struktural semacam itu. Tidak hanya kekecewaan yang sifatnya emosional. Perspektif marxis mengasumsikan kesadaran yang terbangun ialah kesadaran rasional meskipun didasari dengan pertanggungjawaban yang subjektif, yaitu secara ideologis. Sehingga aktor gerakan memahami dengan baik tujuan mereka melakukan aksi kolektif.

McAdam menyatakan bahwa gerakan sosial dapat berlangsung dengan mempertimbangkan *political oportunity structure* (POS) yang ada. Selanjutnya gerakan yang telah muncul akan mengorganisir sumber dayanya untuk memobilisasi sumber dayanya dalam melakukan serangkaian aksi kolektif. Berikutnya gerakan akan terus bertahan dengan adanya proses *cultural framing* dari aktor gerakan kepada seluruh anggotanya untuk terus memperjuangkan cita-cita bersama melalui gerakan sosial tersebut. Oleh karena itu kerangka ini dikenal dengan teori *political oportunity structure* (POS), *Resources mobilization theory* (RMT), dan *cultural framing*.

McAdam mendeskripsikan struktur kesempatan politik dengan empat dimensi²⁰. Dimensi pertama yaitu relativitas keterbukaan dan tertutupan sistem politik, kedua yaitu stabilitas atau instabilitas jejaring persekutuan elite, ketiga ialah ada atau tidaknya aliansi-aliansi elite, dan keempat adalah kapasitas negara untuk melakukan represi.

²⁰McAdam, Doug, 1982. *Political Process and The Development of Block Insurgency 1930-1970*. The Univesity of Chicago Press : Chicago hal 38

Menurut McAdam keterbukaan dan ketertutupan sistem politik adalah faktor kesempatan politik yang paling penting dan dominan dalam memengaruhi dan menentukan kemunculan gerakan. Sebaliknya semakin tertutup sistem politik, maka semakin kecil kesempatan yang ada bagi munculnya aksi kolektif. Namun Eisenger menyatakan bahwa protes lebih dimungkinkan muncul di dalam sistem politik yang dicirikan oleh campur-baur antara faktor-faktor keterbukaan dan ketertutupan.

Dengan kata lain Eisenger mengandaikan bahwa aksi kolektif muncul justru berkurang dalam sistem otoriter dan sangat tertutup atau sistem yang sangat terbuka dan demokratis. Hal tersebut wajar terjadi karena dalam sistem yang sangat tertutup represi akan sangat masif terhadap aksi-aksi kolektif gerakan sosial. Negara dengan mudah bertindak koersif untuk menertibkannya. Hal ini berakibat pada berhamburannya sumber daya yang telah dihimpun dan diorganisir. Maka masing-masing individu tak lagi memiliki wadah yang kuat untuk membentuk ikatan bersama lagi.

Justru sistem politik setengah terbukalah yang memungkinkan terjadinya aksi kolektif. Kondisi seperti ini dicontohkan oleh negara-negara berkembang yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Dalam masa ini keterbukaan politik yang ada belum benar-benar terlembaga. Artinya sistem belum mampu menyerap masukan secara cepat. Akhirnya muncul kekecewaan-kekecewaan terhadap sistem tersebut. Secara tak langsung ketidak-mampuan sistem merespons kekecewaan dengan cepat merepresentasikan wajah negara yang

berkapasitas rendah. Maka bermunculan aksi kolektif di luar sistem politik formal. Pada intinya gerakan sosial tidak beroperasi dalam ruang hampa.

Sekilas pendekatan ini memang persis seperti Smelser dalam menggambarkan *structural conduciveness*. Namun sebenarnya (POS) mengasumsikan aktor-aktor gerakan sosial merupakan individu-individu rasional. Keterbukaan dan tertutupan sistem memang determinan tetapi tidak membuat mereka sepenuhnya bergantung benar akan hal tersebut. Bisa jadi sistem hanya akan mengubah bentuk gerakan dan mobilisasinya tanpa menunda lahirnya aksi kolektif. Artinya kondisi politik lebih didudukkan sebagai faktor ancaman atau pendukung. Sehingga dapat memperhitungkan langkah yang akan diambil dalam memobilisasi gerakan. Munson mencontohkan dalam penelitiannya terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir. Meskipun represi negara terhadap mereka cukup besar organisasi gerakan tersebut tetap eksis dengan memanfaatkan jejaring informal yang mereka miliki.

Kedua yaitu RMT. Dalam perspektif RMT sejak awal mengasumsikan aktor-aktor gerakan merupakan individu yang rasional. RMT melihat gerakan sebagai suatu manifestasi tindakan kolektif yang rasional dan terorganisasi. Sangat berbeda dengan perspektif Smelser yang mengasumsikan gerakan sebagai manifestasi dari kekecewaan-kekecewaan individunya dan jika struktur mampu mengontrolnya maka gerakan akan menghilang. Semisal dengan cara memperbaiki kesejahteraan yang sering kali menjadi penyebab munculnya gerakan.

McAdam mendefinisikan RMT sebagai sarana atau wahana kolektif, baik formal maupun informal, dimana orang-orang dimobilisasi dan terlibat aktif di

dalam aksi kolekti. McCarthy dan Zald menambahkan bahwa pendekatan ini berkaitan dengan keragaman sumber daya yang harus dikapitalisasi untuk merawat keberlangsungan aksi kolektif, ketergantungan terhadap dukungan eksternal, dan antisipasi strategi yang digunakan oleh rezim dalam rangka mengekang aksi kolektif. Maguire membagi sumber daya dalam dua bentuk yaitu *tangibel* dan *intangibel*, artinya ada yang nampak dan tidak. Sumber daya yang nampak misalnya uang, perlengkapan, dan selainnya. sedangkan yang tidak tampak seperti organisasi, jejaring, dan kepemimpinan.

RMT sendiri memang bisa dikatakan sebagai transformasi sekaligus pendetailan dan konsep *mobilizing* dalam kerangka PPM. *Mobilizing structure* memang tidak secara tegas menjelaskan bagaimana proses mobilisasi gerakan berjalan. sementara RMT menjelaskan secara tegas bahwa gerakan sosial merupakan fenomena yang terorganisir. Artinya gerakan mentransformasikan dirinya menjadi organisasi gerakan formal atau bisa disebut *Social Movement organization (SMO)*. Namun begitu RMT tidak membatasi analisa mobilisasi gerakan dengan hanya menggunakan SMO formal semata. Ia juga mempertimbangkan mobilisasi gerakan melalui jejaring-jejaring informal yang mendukung keberadaan SMO.

Selain itu RMT juga mencoba mendeskripsikan bagaimana SMO mampu mengontrol anggota gerakan. Artinya para anggota benar-benar patuh terhadap SMO dan benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan SMO. Dengan kata lain RMT juga mencoba menghindarkan gerakan dari banyaknya *free rider* yang menunggangi gerakan mereka demi kepentingan pribadi. Sehingga secara

keseluruhan sumber daya gerakan diarahkan untuk kepentingan dan cita-cita gerakan.

Dalam aktivisme Islam atau gerakan fundamentalis sumber daya yang utama ialah organisasi dan jaringan. Dalam tulisannya Diane Singerman mendeskripsikan gerakan Islamis di Timur Tengah yang memanfaatkan jejaring informal seperti pengajian-pengajian kecil sebagai wadah komunikasi gerakan untuk menghindari represi negara. Sebab jika berbentuk organisasi formal akan mudah diketahui oleh rezim.

Terakhir ialah *framing process* yaitu skema-skema yang memberikan sebuah bahasa dan saran kognitif untuk memahami pengalaman-pengalaman dan peristiwa-peristiwa di “dunia luar”²¹. Bagi gerakan sosial skema-skema sangat penting untuk menyebarkan penafsiran-penafsiran untuk mobilisasi para anggota. *Framing* juga menjadi semacam pembentuk identitas kolektif diantara individu-individu yang tergabung dalam suatu gerakan. Identitas kolektif terbangun dari kesamaan cara pandang terhadap realitas sosial. Kesamaan cara pandang tersebut terbentuk dari pembingkaihan yang dilakukan gerakan terhadap individu-individu di dalamnya.

Benford dan snow menambahkan bahwa terdapat tiga bentuk pembingkaihan gerakan sosial. Pertama adalah pembingkaihan diagnostik yaitu pembingkaihan yang mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Kedua adalah pembingkaihan prognostik yaitu solusi dari hal-hal yang telah dianggap sebagai masalah dan

²¹WQiktrowich, Quintan, 2012, *Gerakan Sosial Islam Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Gading Publishing dan Paramadina : Jakarta hal 59

penyebabnya. Ketiga adalah pembingkaihan motivasi yaitu pembingkaihan yang bertujuan untuk mengajak anggota bergerak dan beraksi setelah memahami masalah dan sumbernya beserta solusi dari itu semua.

Perlu ditekankan pula bahwa proses pembentukan kesadaran kolektif melalui proses *framing* tidak terjadi di ruang hampa. Artinya proses *framing* berlangsung ditengah-tengah kondisi sosial masyarakat yang melingkupnya. Mustahil *framing* terbentuk dalam kesadaran masing-masing anggota gerakan tanpa adanya refleksi terhadap kondisi sosial masyarakat. Sehingga bisa dikatakan proses *framing*, terutama *diagnostic framing* sangat bergantung pada hal tersebut. Oleh karena itu kondisi sosial masyarakat bisa menjadi pendukung sekaligus penghambat dalam proses *framing*.

Seperti yang dikatakan oleh Wiktorowicz bahwa dimensi paling penting dari proses *Framing* ialah resonansi *framing*, yaitu kemampuan sebuah gerakan untuk mengubah potensi mobilisasi menjadi mobilisasi yang aktual yang bergantung pada kemampuan *framing* untuk memengaruhi para anggota gerakan²². Dalam hal ini tentu mempertimbangkan kesesuaian *frame* dengan simbol-simbol yang terpercaya dan realita empirik yang benar-benar mendukung.

1.5.6 Relevansi Teori dalam Mendeskripsikan Gerakan Islam Politik

Baik Smelser maupun McAdam memiliki perspektif yang berbeda dalam mendeskripsikan gerakan sosial. Smelser menggunakan perspektif psikologi sosial

²²Wiktorowicz, Quintan. 2012. *Gerakan Sosial Islam Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Gading Publishing. Hal 60

dan fungsional dimana para pelaku gerakan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial yang berlangsung, yaitu juga mengakibatkan kekecewaan. Sementara McAdam melihat gerakan sosial sebagai tindakan yang terorganisir. Karena terorganisir maka individu-individu di dalamnya merupakan individu yang rasional. Berbeda dengan Smelser yang memandang individu yang tergabung dalam gerakan sosial merupakan individu yang dipenuhi rasa kecewa terhadap struktur sosial dan perilakunya tidak rasional.

Sementara itu gerakan Islam politik merupakan fenomena gerakan yang dinamis. Para aktivis gerakan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekecewaan terhadap struktur sosial. Mereka mampu berkelidat dengan struktur sosial yang ada untuk memobilisasi gerakannya. Singerman misalnya mencontohkan gerakan Islamis di timur tengah yang mampu bertahan di tengah represi rezim yang masif. Mereka tetap mampu mengelola sumber daya gerakan menjadi aksi kolektif. Sehingga inilah salah satu kelemahan kerangka teori Smelser dalam memotret fenomena gerakan sosial Islam.

Kelemahan kedua dari kerangka teori Smelser ialah penekanannya yang berlebihan pada peranan struktur sosial. Smelser berasumsi bahwa gerakan sosial akan sendirinya hilang jika negara manapun melakukan kontrol sosial baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial maupun represi. Faktanya tidak seperti itu juga. Ziad Munson mencontohkan Ikhwanul Muslimin yang menggunakan kekuatan *framing*. Dengan adanya *framing* ideologi selama struktur tidak ditegakan berdasarkan ideologi Islam maka tidak dapat dikatakan struktur sudah terkendali.

Meskipun kesejahteraan meningkat tidak akan dianggap sebagai suatu cita-cita gerakan yang telah terwujud.

Berikutnya, secara tidak langsung Smelser juga mengasumsikan bahwa gerakan cenderung muncul dalam kondisi struktur yang tegang semisal krisis ekonomi dan pangan di suatu negara. Fakta di negara-negara miskin yang mengalami krisis ekonomi dan pangan jarang memunculkan gerakan sosial. Sebaliknya di negara-negara Eropa yang demokratis dan cukup mapan perekonomiannya malah memunculkan banyak gerakan sosial. Di sinilah kerangka teori Smelser tak mampu menjelaskannya.

Sementara kerangka teori McAdam lebih relevan dan komprehensif dalam memotret fenomena gerakan sosial. Mulai dari kemunculan hingga keberlangsungan dalam melakukan serangkaian aksi kolektif. Sebab kerangka teori McAdam melihat gerakan sebagai tindakan yang rasional dan terorganisir.

Selain itu dalam PPM gerakan sosial muncul dan berkembang sebagai suatu hal yang disadari penuh oleh aktornya. Sejak awal mereka berupaya menentang otoritas kekuasaan yang ada. Mereka pun membangun kesadaran kolektif serta memobilisasi sumber dayanya. Dengan tujuan mengintervensi otoritas politik formal seperti negara, untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Dan mereka mampu berkelindan dengan struktur yang ada. Oleh karena itu kerangka teori McAdam lebih relevan mendeskripsikan fenomena HTI di Surabaya. Sebab HTI secara tegas mengatakan bahwa mereka bukan sekedar gerakan sosial semata namun juga mengarah ke politik. Sehingga upaya mobilisasi yang dilakukan HTI merupakan upaya politik menentang otoritas rezim.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah pada aspek gerakan sosial. Namun bukan pendekatan gerakan sosial seperti sosiologi. Perspektif gerakan sosial yang digunakan ialah perspektif politik yaitu memandang gerakan sosial sebagai upaya politik, sebagai bentuk persetujuan politik antara aktor gerakan dengan rezim. Sebab subjek yang diteliti merupakan suatu gerakan sosial yang memiliki cita-cita religio politik.

Secara detail lokus yang diteliti ialah kemunculan dan format gerakan yang dipengaruhi oleh keterbukaan dan ketertutupan peluang struktur politik, pola mobilisasi gerakannya, dan kerangka berpikir yang dibangun kepada seluruh anggota gerakan untuk mewujudkan cita-cita gerakan.

I.6.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan objek kajian dengan dibantu oleh teori tertentu. Tujuannya ialah mengidentifikasi sekaligus menjelaskan secara teoritik dan konseptual mengenai objek yang diteliti. Dan hasil temuan nantinya dijabarkan secara deskriptif melalui interpretasi teoritik sehingga membentuk suatu penjelasan yang utuh dan komprehensif dari fenomena yang didapat.

Penelitian ini hendak mendeskripsikan secara kualitatif mengenai kondisi politik yang melatarbelakangi perkembangan gerakan HTI Surabaya, mobilisasi yang dilakukannya, hingga proses *framing* yang dilakukan dalam rangka menjaga

kontinuitas gerakan. Tipe penelitian ini dipilih karena tidak hendak menguji konsep-konsep terkait gerakan sosial melainkan hendak memotret fenomena HTI Surabaya melalui teori gerakan sosial.

I.6.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu studi kasus. Maksudnya adalah penulis dalam melakukan penelitian tidak hendak meneliti gerakan HTI ini dalam konteks yang luas namun hanya dalam lingkup Surabaya. Dan data diperoleh bukan melalui studi pustaka tetapi secara langsung melalui wawancara dan observasi. Oleh karena itu hasil temuan yang didapat belum bisa dijadikan generalisasi.

I.6.4. Sumber Data

Data yang didapatkan dari informan adalah data primer dalam penelitian. Informan terdiri dari beberapa aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berada di Surabaya dan beberapa orang lain yang juga bersentuhan dengan aktivisme HTI di Surabaya. Sebab penelitian ini ialah penelitian deskriptif dan studi kasus sehingga harus menjangkau sumber-sumber yang terlibat langsung.

Beberapa orang non aktivis HTI Surabaya yang dapat dijadikan sumber data antara lain aktivis organisasi Islam yang bersentuhan dengan aktivisme HTI seperti NU. Selani itu bisa pula mantan aktivis HTI Surabaya. Dengan begitu maka data yang didapatkan bisa diuji dari dua sudut pandang yaitu internal dan eksternal HTI Surabaya.

Selain itu data juga didapatkan melalui observasi. Ada beberapa aksi kolektif yang bisa diamati secara langsung dengan menjadi pesertanya. Dari situ maka akan

lebih mempertajam analisis yang dilakukan. Penentuan informan dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang memiliki informasi kunci mengenai tiga rumusan masalah yang diajukan. Dengan kata lain informan didapat secara *purposive*.

I.6.5. Teknik Pengumpulan Data

I.6.5.1 Wawancara Mendalam

Adalah pengumpulan data dengan tujuan merekonstruksi konteks yang beragam sebagai bagian dari pengalaman dan memproyeksikan harapan di masa yang akan datang.

Wawancara mendalam bersifat lentur dan tidak terstruktur ketat serta dapat dilakukan secara berulang secara informan yang sama. Sehingga pertanyaan semakin terfokus dan mampu mendapatkan data secara terperinci. Wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung (tatap muka) dengan informan yang berasal dari beberapa orang aktivis yang terlibat didalam kegiatan keorganisasian HTI Surabaya serta pihak-pihak yang bersinggungan dengan aktivisme HTI Surabaya.

I.6.5.2. FGD (Focus Group Discusion)

FGD merupakan bentuk pengumpulan data dengan berdiskusi. Tentu yang didiskusikan mengenai rumusan masalah penelitian yang diangkat. Dalam hal ini subjek yang diajak untuk diskusi ialah beberapa orang aktivis yang terlibat di dalam kegiatan ke organisasian HTI Surabaya serta pihak-pihak yang bersinggungan dengan aktivisme HTI Surabaya.

I.6.5.3. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung terhadap kegiatan dari subyek yang teliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses tindakan dan aktivitas dari aktivis gerakan baik melalui terlibat langsung di dalam kegiatan muktamar, konsolidasi, atau kaderisasi HTI.

Terdapat beberapa aksi kolektif yang sering diadakan oleh HTI seperti *longmarch*, pernyataan pendapat dan sikap di depan publik, seminar umum, dan lain sebagainya. Aksi-aksi tersebut yang masih bisa dimasuki untuk dilakukan proses observasi. Selain itu proses kaderisasi pun bisa dimasuki untuk observasi jika ada jaringan ke dalamnya.

I.6.6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara dan observasi. Sebab pengumpulan dilakukan melalui wawancara dengan beberapa aktivis HTI Surabaya dan pihak yang bersangkutan dengan aktivisme mereka dan juga dengan observasi aksi-aksi kolektif mereka.

I.6.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bersifat induktif, semua simpulan dibentuk dari semua informasi yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan bersamaan sejak awal dengan proses pengumpulan data, dengan melakukan teknik refleksi bagi pendalaman dan pemantapan data. Setiap data yang diperoleh akan selalu dibenturkan dengan masing-masing pisau analisis berupa teori gerakan sosial yang

dipakai untuk mendeskripsikan fenomena yang terikat dengan mobilisasi gerakan HTI di Surabaya. Singkatan akan dilakukan interpretasi dan analisis transkrips, narasi, dan teks.

